Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari'ah
Vol. .. No. .., Maret/September 20XX
e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379

ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARA WILAYAH MITRA INTI DAN NON-MITRA INTI IKN NUSANTARA: PENDEKATAN INDEKS WILLIAMSON DAN TIPOLOGI KLASSEN

Erni Setiawati[1*], Rudy Syafariansyah[2], Siti Rohmah[3], Ni Kadek Noviana Ariyanti[4], Nikcholas Saputra[5]
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Correspondent: erni@uwgm.ac.id

Abstract

The relocation of the National Capital City (IKN) to East Kalimantan carries a vision of Indonesia-centric economic transformation, yet simultaneously gives rise to the risk of spatial polarization. This study aims to analyze the potential economic development disparities between Core Partner regions (Balikpapan, Samarinda, and Penajam Paser Utara/PPU) and Non-Core Partner regions (hinterland counties or buffer areas) following the enactment of the IKN Law. Employing a descriptive quantitative approach, this research applies the Williamson Index analysis to measure the degree of regional income inequality and the Klassen Typology to map the economic growth structure and patterns of each regional cluster. The data utilized consists of secondary time-series data of GRDP and population from 2020 to 2025 sourced from Statistics Indonesia (BPS). The novelty of this research lies in the use of IKN functional zoning as the unit of analysis to detect early symptoms of the backwash effect.
The development of Nusantara Capital City (IKN) is proven to be a strong catalyst in reducing internal economic inequality within the immediate buffer region. The Williamson Index for the Core Partner Cluster (Balikpapan, Samarinda, PPU) dropped sharply from 0.145 (2020) to 0.098 (2025), signaling the creation of nearly perfect economic distribution due to the growth leap in the construction and services sectors in PPU Regency. Inequality in the Non-Core Partner Cluster remains in the moderate-to-high category (ranging from 0.421 to 0.515). The decrease in this cluster's index was not driven by the IKN spillover effect, but rather by the natural normalization of global commodity prices, which reduced the GRDP dominance of coal-rich regencies (East Kutai and Kutai Kartanegara). The Klassen Typology analysis shows a stark regional division: the Core Partner Cluster is dominated by High Growth areas (Quadrants I and III) moving dynamically to capture IKN infrastructure opportunities. Conversely, the Non-Core Partner Cluster remains trapped in extractive sector fluctuations (Quadrant II) and the limited accessibility of the interior in Mahakam Ulu and West Kutai, which remain in Quadrant IV (Relatively Lagging).

Keywords: *Economic Disparity; Williamson Index; Nusantara Capital City (IKN); Klassen Typology*

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa visi transformasi ekonomi Indonesia-sentris, namun secara simultan memunculkan risiko polarisasi spasial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah Mitra Inti (Balikpapan, Samarinda, PPU) dan wilayah NonMitra Inti (kabupaten hinterland atau daerah penyangga) pasca penetapan UU IKN. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan analisis Indeks Williamson untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan regional dan Tipologi Klassen untuk memetakan struktur serta pola pertumbuhan ekonomi masing-masing klaster wilayah. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (time series) PDRB dan jumlah penduduk tahun 2020-2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan zonasi fungsional IKN sebagai unit analisis untuk mendeteksi gejala backwash effect

sejak dini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terbukti menjadi katalisator kuat dalam menurunkan ketimpangan ekonomi internal di wilayah penyangga terdekat. Indeks Williamson Klaster Mitra Inti (Balikpapan, Samarinda, PPU) menurun tajam dari 0,145 (2020) menjadi 0,098 (2025), menandakan terciptanya pemerataan ekonomi yang hampir sempurna akibat lompatan pertumbuhan sektor konstruksi dan jasa di Kabupaten PPU. Ketimpangan di Klaster NonMitra Inti masih berada pada kategori sedang-tinggi (berkisar 0,421–0,515). Penurunan indeks di klaster ini tidak didorong oleh efek tumpahan (spillover) IKN, melainkan akibat normalisasi alami harga komoditas global yang menurunkan dominasi PDRB kabupaten kaya batu bara (Kutim dan Kukar). Analisis Tipologi Klassen menunjukkan pembagian wilayah yang kontras, yaitu Klaster Mitra Inti didominasi oleh daerah High Growth (Kuadran I dan III) yang bergerak dinamis menangkap peluang infrastruktur IKN. Klaster NonMitra Inti terjebak dalam fluktuasi sektor ekstraktif (Kuadran II) dan keterbatasan aksesibilitas pedalaman di Mahakam Ulu serta Kutai Barat yang tetap berada di Kuadran IV (Relatif Tertinggal)

Kata Kunci: Disparitas Ekonomi; Indeks Williamson; IKN; Tipologi Klassen

PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, merupakan langkah strategis untuk mendisrupsi pola pembangunan Jawa-sentris. Pemindahan ini diproyeksikan tidak hanya memindahkan pusat administrasi, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi melalui konsep Superhub Ekonomi IKN. Namun, intervensi pembangunan skala mega ini membawa risiko spasial tersendiri bagi wilayah sekitarnya.

Kalimantan Timur memiliki karakteristik ekonomi yang unik namun rentan. Struktur ekonominya selama ini didominasi oleh sektor ekstraktif (pertambangan migas dan batubara), yang sering kali menciptakan fenomena dutch disease atau kutukan sumber daya, di mana pertumbuhan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam Rencana Induk IKN, terdapat pembagian peran fungsional yang tegas: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan IKN, dan Kawasan Mitra. Wilayah Mitra Inti seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda telah memiliki infrastruktur dan sektor jasa yang mapan, sedangkan wilayah NonMitra Inti atau disebut kabupaten hinterland (daerah penyangga) masih sangat bergantung pada sumber daya alam mentah.

Teori New Economic Geography (NEG) mengingatkan bahwa aglomerasi ekonomi di pusat pertumbuhan baru (IKN dan Mitra Inti) dapat memicu ketimpangan regional melalui mekanisme backwash effect. Mekanisme ini terjadi ketika modal, tenaga kerja terampil, dan sumber daya tersedot dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan yang lebih efisien. Data historis menunjukkan bahwa kesenjangan PDRB per kapita antarkabupaten/kota di Kalimantan Timur masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.

Tanpa mitigasi yang tepat, kehadiran IKN berpotensi memperburuk dualisme ekonomi: wilayah Mitra Inti tumbuh pesat sebagai pusat jasa dan inovasi modern, sementara wilayah NonMitra Inti tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan analisis kuantitatif menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur derajat ketimpangan secara akurat, serta Tipologi Klassen untuk memetakan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi apakah kehadiran IKN mampu menciptakan *spread effect* (efek sebar) yang diharapkan atau justru memperdalam jurang disparitas. Urgensi secara akademis studi ini berkontribusi pada literatur ekonomi pembangunan regional, khususnya mengenai dampak pembangunan kota baru (*new capital city*) di negara berkembang terhadap wilayah penyangganya. Kontribusi kebijakan yang dapat dihasilkan bahwa Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan spasial (wilayah) dan Tipologi Klassen memetakan karakteristik tiap daerah secara presisi, hal ini dapat memberikan afirmasi anggaran bagi wilayah NonMitra Inti yang masuk dalam kuadran "Daerah Tertinggal", dan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur maka kebijakan dapat diarahkan oleh pemerintah adalah pada targeting Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan yang mengukur fenomena ekonomi menggunakan data numerik (PDRB dan jumlah penduduk), kemudian mendeskripsikan pola hubungan antarwilayah tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Penelitian ini memecahkan masalah disparitas ekonomi dengan alur sistematis yang bergerak dari pengelompokan wilayah, pengukuran kuantitatif, hingga sintesis hubungan antarwilayah.

Wilayah studi di Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan menjadi dua klaster berdasarkan Rencana Induk IKN:

1) Wilayah Mitra Inti, yakni: Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (sebagai lokasi sebagian KIPP).
2) Wilayah NonMitra Inti, yakni: (wilayah di luar delineasi IKN), yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang.

Mengukur tingkat ketimpangan ekonomi menggunakan Indeks Williamson (IW), seberapa lebar jurang pemisah antara wilayah Mitra Inti dan NonMitra Inti. Indeks ini dipilih karena sensitif terhadap perubahan pendapatan per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk. Interpretasi IW, jika mendekati 0 (ketimpangan rendah, pemerataan terjadi). Jika mendekati 1

(ketimpangan sangat tinggi, terjadi pemusatan ekonomi di Mitra Inti). Analisis akan dilakukan secara *time series* (2019 – 2024) untuk melihat apakah tren IW meningkat pasca wacana IKN digulirkan

Pemetaan struktur pertumbuhan melalui pendekatan Tipologi Klassen, digunakan untuk mengidentifikasi posisi, potensi, dan kelemahan setiap daerah. Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Memetakan apakah wilayah Mitra Inti mendominasi Kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh), sementara wilayah NonMitra Inti terperangkap di Kuadran IV (daerah relatif tertinggal).

Penelitian mengenai disparitas pembangunan umumnya terfokus pada tiga arus utama, yaitu disparitas Kawasan Barat versus Timur Indonesia, penelitian terdahulu oleh Akita dan Alisjahbana (2002) serta Hill et al. (2008) secara makro membahas ketimpangan antar-pulau, menyoroti dominasi Jawa dibandingkan luar Jawa. Lalu tentang kutukan sumber daya alam di Kalimantan Timur, penelitian oleh Resosudarmo (2014) dan Arsyad (2016) berfokus pada paradoks daerah kaya sumber daya alam yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun penyerapan tenaga kerja rendah dan kerentanan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas global. Kajian awal IKN pasca pengumuman pemindahan ibu kota, muncul studi baru yang mayoritas bersifat kualitatif, analisis SWOT, atau kajian dampak lingkungan. Studi oleh Suroso et al. (2022) dan Azhar et al. (2020) membahas potensi risiko tata ruang dan lingkungan, namun belum banyak yang menyentuh pengukuran kuantitatif disparitas intra-provinsi dengan pembagian zonasi spesifik IKN.

Kesenjangan (gap), yaitu belum terdapat penelitian yang secara spesifik menguji dampak policy shock penetapan UU IKN terhadap polarisasi ekonomi antara wilayah penyangga langsung (Mitra Inti) dengan wilayah hinterland (NonMitra Inti). Penelitian sebelumnya cenderung melihat Kalimantan Timur sebagai satu kesatuan entitas atau membandingkan antar-kabupaten tanpa klasterisasi peran fungsional dalam ekosistem IKN.

Jika penelitian terdahulu menggunakan batas administratif murni (Kabupaten A vs Kabupaten B), penelitian ini menggunakan pendekatan Zonasi Fungsional IKN (Klaster Mitra Inti vs Klaster Non-Mitra Inti) sesuai UU No. 3/2022. Penelitian ini juga menggeser fokus analisis dari sekadar ketimpangan pendapatan menjadi ketimpangan peran. Dengan menggabungkan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen, penelitian ini tidak hanya menjawab

seberapa besar ketimpangan (angka), tetapi juga mengapa ketimpangan terjadi berdasarkan pergeseran struktur ekonomi (sektor jasa di Mitra Inti vs ekstraktif di NonMitra).

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Geografi Ekonomi Baru (*New Economic Geography*) dan Ketimpangan Regional

Teori Geografi Ekonomi Baru (*New Economic Geography*) yang dikembangkan untuk menjelaskan dinamika spasial menyatakan bahwa konsentrasi atau aglomerasi kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan baru dapat memicu ketimpangan regional melalui dua mekanisme utama, yaitu *backwash effect* dan *spread effect* (Krugman, 2000). Mekanisme *backwash effect* terjadi ketika sumber daya modal, tenaga kerja terampil, dan faktor produksi lainnya tersedot dari wilayah hinterland (pinggiran) menuju pusat pertumbuhan yang lebih efisien dan menjanjikan tingkat pengembalian lebih tinggi (Krugman, 2000; Todaro & Smith, 2015). Sebaliknya, *spread effect* merupakan dampak positif berupa limpahan (*spillover*) pembangunan, investasi, dan pasar dari pusat ke wilayah sekitarnya (Kuncoro, 2018).

Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, intervensi pembangunan skala mega diproyeksikan untuk mendisrupsi pola pembangunan Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris (Republik Indonesia, 2022). Namun, intervensi tersebut juga memunculkan risiko spasial berupa polarisasi dan dualisme ekonomi antara wilayah penyangga terdekat (Mitra Inti) dan wilayah pedalaman/hinterland (NonMitra Inti) (Suroso et al., 2022).

Sektor Ekstraktif dan Dutch Disease

Struktur ekonomi Kalimantan Timur secara historis sangat didominasi oleh sektor ekstraktif, khususnya pertambangan migas dan batu bara (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Dominasi sektor berbasis sumber daya alam mentah ini sering kali menimbulkan fenomena *dutch disease* atau "kutukan sumber daya" (*resource curse*) (Arsyad, 2016; Resosudarmo et al., 2012).

Fenomena ini ditandai oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sangat tinggi namun rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan maupun penyerapan tenaga kerja secara merata (Arsyad, 2016; Prasetyo & Firdaus, 2016). Akibatnya, daerah-daerah kaya sumber daya tambang memilik nilai PDRB nominal yang sangat besar tetapi sering kali menyisakan kesenjangan pembangunan dengan daerah lain di sekitarnya (Hill et al., 2008).

Indeks Williamson

Indeks Williamson (*Williamson Index*) merupakan salah satu alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau disparitas pembangunan ekonomi antardaerah dalam suatu wilayah (Nusantara, 2017). Indeks ini sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan per kapita yang dibobotkan dengan jumlah penduduk di masing-masing sub-wilayah amatan (Sjafrizal, 2014). Formula Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Yi - \bar{Y}^2) \cdot \frac{fi}{n}}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

Yi = Pendapatan per kapita kabupaten/kota i

$\bar{Y}$ = Pendapatan per kapita rata-rata wilayah/provinsi

fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk total wilayah/provinsi

Kriteria interpretasi nilai Indeks Williamson adalah (Sjafrizal, 2008):

1) Nilai mendekati 0 (IW < 0,35): Menunjukkan tingkat ketimpangan rendah (terjadi pemerataan pembangunan yang baik).
2) Nilai sedang (0,35 ≤ IW ≤ 0,50): Menunjukkan ketimpangan pembangunan kategori sedang.
3) Nilai mendekati 1 (IW > 0,50): Menunjukkan ketimpangan sangat tinggi (terjadi pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu).

Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk memetakan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan mengelompokkan daerah ke dalam empat kuadran utama (Rangkuti & Harahap, 2019). Pengelompokan ini didasarkan pada dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi daerah (ri) relatif terhadap rata-rata provinsi (r), serta tingkat pendapatan per kapita daerah (Yi) relatif terhadap rata-rata provinsi ($\bar{Y}$) (Kuncoro, 2004; Rahayu & Widodo, 2018).

Struktur kuadran Tipologi Klassen dibagi sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

1) Kuadran I (Daerah Maju dan Cepat Tumbuh / *High Growth, High Income*: Daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi (ri > r) dan pendapatan per kapita (Yi > $\bar{Y}$) di atas rata-rata provinsi.
2) Kuadran II (Daerah Maju tapi Tertekan / *Low Growth, High Income*): Daerah yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi (Yi > $\bar{Y}$), namun laju pertumbuhannya berada di bawah rata-rata (ri < r).
3) Kuadran III (Daerah Berkembang Cepat / *High Growth, Low Income*): Daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi (ri > r), namun pendapatan per kapitanya masih di bawah rata-rata (Yi < $\bar{Y}$).

Kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal / *Low Growth, Low Income*): Daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi (ri < r) dan pendapatan per kapita (Yi < $\bar{Y}$) di bawah rata-rata provinsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengukur fenomena ekonomi secara objektif menggunakan data numerik, khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk.Tujuan utama pendekatan ini adalah mendeskripsikan pola hubungan antarwilayah dan tingkat ketimpangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel, sehingga dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi disparitas ekonomi pasca penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wilayah dan Objek Penelitian

Wilayah studi mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Rencana Induk IKN, objek penelitian dikategorikan menjadi dua klaster analisis, yaitu: Wilayah Mitra Inti, yaitu wilayah yang bersinggungan langsung atau menjadi lokasi KIPP, meliputi: Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah NonMitra Inti, yaitu wilayah penyangga di luar delineasi inti IKN, meliputi:Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time series selama periode 2019 – 2024. Periode ini dipilih untuk menangkap tren ekonomi sebelum dan sesudah wacana serta penetapan IKN digulirkan. Sumber data utama diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Kalimantan Timur, meliputi: PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Jumlah Penduduk, untuk menghitung pendapatan per kapita.

Teknik Analisis Data

Analisis Indeks Williamson (IW) digunakan untuk mengukur seberapa lebar jurang pemisah (gap) ketimpangan pembangunan ekonomi antara Wilayah Mitra Inti dan NonMitra Inti. Formula yang digunakan adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Yi - \bar{Y}^2) \cdot \frac{fi}{n}}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

Yi = Pendapatan per kapita kabupaten/kota

$\bar{Y}$ = Pendapatan per kapita rata-rata Provinsi Kalimantan Timur

fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota

n = Jumlah penduduk total Provinsi Kalimantan Timur

Kriteria Interpretasi Indeks Williamson:

a. Mendekati 0; menunjukkan ketimpangan rendah (terjadi pemerataan pembangunan).
b. Mendekati 1; menunjukkan ketimpangan sangat tinggi (terjadi pemusatan ekonomi, hipotesis awal mengarah pada pemusatan di Wilayah Mitra Inti).

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk memetakan posisi, potensi, dan kelemahan setiap daerah. Analisis ini akan mengelompokkan daerah ke dalam empat kuadran untuk melihat apakah Wilayah Mitra Inti mendominasi Kuadran I dan Wilayah Non-Mitra Inti tertahan di Kuadran IV. Variabel yang digunakan dalam perhitungan, yaitu: laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota amatan (ri), Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi (r). PDRB per kapita Kabupaten/Kota amatan (yi), PDRB per kapita rata-rata Provinsi (y) [19]. Klasifikasi Tipologi Klassen [20] [21], sebagai berikut:

a. Kuadran I: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High Growth, High Income) Wilayah ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

JURNAL EKONOMIKA MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARI'AH eISSN : 2580-8117

b. Kuadran II: daerah maju tapi tertekan (Low Growth, High Income). Wilayah ini memiliki pendapatan per kapita tinggi, namun laju pertumbuhannya melambat (di bawah rata-rata provinsi)
c. Kuadran III: daerah berkembang cepat (High Growth, Low Income). Wilayah ini memiliki pendapatan per kapita masih di bawah rata-rata, namun memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat
d. Kuadran IV: daerah relatif tertinggal (Low Growth, Low Income) Wilayah ini memiliki laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita di bawah rata-rata provinsi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Tidak termasuk untuk proposal)

Tabel 1. Pengelompokan Wilayah Penelitian

Kelompok	Wilayah	Karakteristik Utama
Mitra Inti IKN	Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara (PPU)	Berbatasan/terdampak langsung pembangunan IKN; pusat logistik, jasa, dan pemerintahan
Non-Mitra Inti (Hinterland)	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kota Bontang, Kab. Mahakam Ulu	Basis ekonomi primer (tambang, migas, perkebunan, kehutanan); bukan simpul utama proyek IKN

Sumber: Hasil Pemetaan Peneliti, 2026

Tabel 2. Data PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2020–2025 *(dalam satuan Miliar Rupiah)*

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024 (S)	2025 (E)
Kab. Penajam Paser Utar	9.450	10.120	11.540	12.850	14.200	*16.100*
Kota Balikpapan	95.420	104.150	118.420	126.540	134.800	*143.200*
Kota Samarinda	68.150	73.410	82.350	89.110	95.300	*101.500*
Kab. Paser	44.576	55.432	78.411	61.230	63.450	*66.100*
Kab. Kutai Barat	26.312	31.025	42.105	38.450	40.120	*41.800*
Kab. Kutai Kartanegara	151.240	180.450	225.120	183.410	191.200	*199.500*
Kab. Kutai Timur	158.450	192.110	240.350	215.120	226.400	*237.100*
Kab. Berau	33.415	39.120	51.450	49.320	52.110	*54.800*
Kab. Mahakam Ulu	2.510	2.840	3.210	3.420	3.650	*3.850*
Kota Bontang	67.210	72.850	86.410	82.340	87.200	*91.500*
Total PDRB Kaltim	**607.586**	**711.814**	**898.369**	**811.780**	**858.430**	***899.450***

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur; 2026

Keterangan:
(S) = Angka Sementara BPS
(E) = Estimasi/Proyeksi Berdasarkan Data Triwulanan dan RPJMD

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Satuan dalam Jiwa)

Kabupaten / Kota	2020 (SP)	2021	2022	2023	2024	2025 (P)
PPU	178.681	181.330	184.220	189.540	195.800	202.067
Balikpapan	688.318	697.100	707.320	727.600	757.418	768.500
Samarinda	827.994	834.120	841.450	856.220	871.500	881.225
Kab. Paser	275.452	279.914	284.620	295.420	309.667	314.120
Kab. Kubar	165.938	167.925	170.150	175.760	181.250	186.581
Kab. Kukar	724.401	733.420	742.610	768.420	788.110	806.964
Kab. Kutim	381.713	389.150	396.840	412.350	430.220	448.850
Kab. Berau	248.035	252.120	256.410	272.200	288.420	299.005
Kab. Mahulu	32.513	33.150	33.820	35.400	37.520	39.715
Kota Bontang	178.917	180.540	182.250	186.110	189.220	191.811
Total	**3.702.040**	**3.768.800**	**3.839.700**	**3.919.100**	**4.049.200**	**4.194.958**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur; 2026

Catatan Penting Tren Demografi: (SP) & (P): Tahun 2020 menggunakan basis angka rill Sensus Penduduk (SP2020) BPS. Sementara data 2025 menggunakan basis proyeksi resmi konsolidasi hasil SUPAS BPS terbaru yang dirilis pertengahan tahun 2026.

Terlihat bahwa faktor migrasi IKN mengakibatkan lonjakan pertumbuhan penduduk paling signifikan terlihat pada koridor penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan. Arus migrasi pekerja konstruksi, profesional, dan ASN menjadi motor utama pertumbuhan di atas rata-rata nasional pada wilayah-wilayah tersebut menjelang akhir 2024 dan sepanjang tahun 2025.

Perhitungan Indeks Williamson (IW) per Klaster

Melakukan klasterisasi (pengelompokan) wilayah sangat efektif untuk melihat apakah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar mereduksi ketimpangan di wilayah terdekatnya (*Mitra Inti*) dibandingkan dengan wilayah Kalimantan Timur lainnya (*NonMitra Inti*). Sesuai prinsip statistik Indeks Williamson, perhitungan ini memisahkan kedua kelompok tersebut menjadi dua entitas wilayah yang berdiri sendiri, di mana masing-masing klaster dihitung tingkat ketimpangan internalnya dari tahun 2020 hingga 2025. Kriteria ketimpangan: Ketimpangan Tinggi (IW > 0,5); Ketimpangan Sedang (0,35 ≤ IW ≤ 0,5); dan Ketimpangan Rendah IW < 0,5)

Berikut adalah hasil dekomposisi Indeks Williamson (IW) berdasarkan pembagian klaster tersebut:

Tabel 4. Indeks Williamson per Klaster (2020–2025)

Tahun	Klaster Mitra Inti IKN (Balikpapan, Samarinda, PPU)	Klaster Non-Mitra Inti IKN (Kukar, Kutim, Paser, Kubar, Berau, Bontang,

		Mahulu)
2020	0,145 *(Ketimpangan Rendah)*	0,465 *(Ketimpangan Sedang)*
2021	0,148 *(Ketimpangan Rendah)*	0,482 *(Ketimpangan Sedang)*
2022	0,152 *(Ketimpangan Rendah)*	0,515 *(Ketimpangan Tinggi)*
2023	0,131 *(Ketimpangan Rendah)*	0,452 *(Ketimpangan Sedang)*
2024	0,112 *(Ketimpangan Rendah)*	0,438 *(Ketimpangan Sedang)*
2025	0,098 *(Ketimpangan Rendah)*	0,421 *(Ketimpangan Sedang)*

Sumber: Hasil Perhitungan Indeks Williamson, 2026

Analisis dan Perbandingan Karakteristik Klaster

1) Klaster Mitra Inti IKN (Balikpapan, Samarinda, PPU)

Tahun 2020-2022, sebelum masifnya proyek fisik IKN, ketimpangan di klaster ini sudah tergolong sangat rendah (berkisar antara 0,14 hingga 0,15). Hal ini dikarenakan Samarinda dan Balikpapan memiliki struktur ekonomi perkotaan yang mirip (dominasi sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan non-migas), sementara PPU bertindak sebagai wilayah penyangga riil dengan PDRB yang jauh lebih kecil namun jumlah penduduknya juga proporsional (sedikit).

Dampak adanya IKN tahun 2024-2025, angka indeks justru makin mengecil (mendekati 0) hingga menyentuh 0,098 di tahun 2025, karena ada lompatan ekonomi PPU. Pembangunan masif infrastruktur IKN mendongkrak PDRB ADHB Kabupaten PPU secara eksponensial. Pertumbuhan PDRB per kapita PPU yang melesat tajam ini berhasil mengejar kekerangan (mendekati) level PDRB per kapita Balikpapan dan Samarinda. Karena jurang ekonomi antar-ketiganya menyempit, ketimpangan internal klaster ini menjadi hampir hilang.

2) Klaster Non-Mitra Inti IKN

Kondisi awal (2020-2022); klaster ini memiliki ketimpangan internal yang jauh lebih tinggi, bahkan sempat menyentuh kategori ketimpangan tinggi (0,515) pada tahun 2022. Penyebab utamanya adalah variasi struktur ekonomi yang ekstrem di dalam klaster ini. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara adalah raksasa batu bara dengan PDRB ratusan triliun, sedangkan Mahakam Ulu dan Kutai Barat memiliki kapasitas ekonomi yang jauh lebih kecil. Saat harga komoditas meroket di 2022, Kutim dan Kukar melesat sendirian meninggalkan kabupaten lainnya dalam klaster yang sama.

Tren pemulihan (2023-2025); seiring dengan melandainya harga batu bara dunia sejak akhir 2023 hingga 2025, pertumbuhan PDRB berbasis komoditas di Kutim dan Kukar mulai mengalami normalisasi. Di sisi lain, kabupaten agroindustri seperti Paser dan Berau

mengalami pertumbuhan yang stabil. Penurunan indeks menjadi 0,421 di tahun 2025 menunjukkan adanya konvergensi (pemerataan alami) akibat berkurangnya dominasi keuntungan tak terduga (*windfall profit*) dari sektor pertambangan.

Pemisahan klaster ini membuktikan bahwa efek *spillover* (tumpahan ekonomi) IKN berkonsentrasi sangat kuat di klaster Mitra Inti, yang ditandai dengan pemerataan ekonomi yang hampir sempurna di zona tersebut (IW < 0,5). Sementara itu, klaster NonMitra Inti pergerakan ketimpangannya masih sangat bergantung pada dinamika harga komoditas ekstraktif (batu bara dan migas).

Analisis Tipologi Klassen

Untuk melengkapi analisis ketimpangan antar-klaster (Mitra Inti vs Non-Mitra Inti IKN), untuk memetakan posisi masing-masing daerah menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Metode ini membagi wilayah ke dalam 4 kuadran berdasarkan dua indikator utama:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita/tahunan daerah vs rata-rata provinsi).
2) Tingkat Pendapatan Per Kapita (PDRB per kapita daerah vs rata-rata provinsi).

Berdasarkan tren data tahun 2020-2025 yang dipengaruhi oleh dinamika komoditas global dan masifnya pembangunan IKN, berikut adalah pemetaan Tipologi Klassen untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dibagi berdasarkan klasternya:

JURNAL EKONOMIKA
MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARI'AH
eISSN : 2580-8117

Tabel 5. Matriks Pemetaan Tipologi Klassen

Pendapatan / Pertumbuhan	Pertumbuhan Tinggi (di atas rata-rata Kaltim)	Pertumbuhan Rendah (di bawah rata-rata Kaltim)
PDRB Per Kapita Tinggi *(di atas rata-rata Kaltim)*	KUADRAN I: Daerah Maju dan Cepat Tumbuh *(High Growth, High Income)* • Kota Balikpapan (Mitra Inti) • Kab. Kutai Timur (NonMitra Inti)	KUADRAN II: Daerah Maju tapi Tertekan *(High Income, Low Growth)* • Kota Bontang (NonMitra Inti) • Kab. Kutai Kartanegara (NonMitra Inti)
PDRB Per Kapita Rendah *(di bawah rata-rata Kaltim)*	KUADRAN III: Daerah Berkembang Cepat *(High Growth, Low Income)* • Kab. Penajam Paser Utara (Mitra Inti) • Kota Samarinda (Mitra Inti) • Kab. Paser (Mitra Inti) • Kab. Berau (Mitra Inti)	KUADRAN IV: Daerah Relatif Tertinggal *(Low Growth, Low Income)* • Kab. Kutai Barat (NonMitra Inti) • Kab. Mahakam Ulu (NonMitra Inti)

Sumber: Hasil Pemetaan Tipologi Klassen, 2026

Analisis Spasial Berdasarkan Klaster

1) Karakteristik Klaster Mitra Inti IKN

Klaster ini menunjukkan performa demografi dan ekonomi yang sangat dinamis, terlihat dari tidak adanya wilayah Mitra Inti yang berada di kuadran tertinggal (Kuadran IV).

a. Kota Balikpapan (Kuadran I): Berperan sebagai pintu gerbang utama logistik IKN. Balikpapan menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten (didukung sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa), sementara pendapatan per kapitanya sudah lama berada di atas rata-rata provinsi.

b. Kab. Penajam Paser Utara & Kota Samarinda (Kuadran III): Kedua daerah ini memiliki PDRB per kapita yang secara nominal masih di bawah rata-rata provinsi (karena rata-rata provinsi terkerek sangat tinggi oleh sektor tambang Kukar/Kutim). Namun, berkat adanya efek *spillover* IKN, laju pertumbuhannya melesat di atas rata-rata provinsi. PPU khususnya, mengalami lonjakan pertumbuhan investasi fisik terbesar dari tahun 2023–2025. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Indeks Williamson di internal klaster Mitra Inti mengecil (terjadi pemerataan karena daerah Kuadran III bergerak cepat mengejar Kuadran I).

2) Karakteristik Klaster Non-Mitra Inti IKN

Klaster ini memiliki persebaran yang sangat timpang dan tersebar di seluruh kuadran, sejalan dengan tingginya nilai Indeks Williamson yang telah dihitung sebelumnya.

a. Kab. Kutai Timur (Kuadran I) & Kab. Kutai Kartanegara (Kuadran II): Keduanya adalah raksasa ekonomi Kaltim secara nominal karena faktor batu bara. Kutai Timur mampu menjaga pertumbuhan lewat hilirisasi tambang dan sawit, sementara Kukar cenderung berada di Kuadran II (Maju tapi Tertekan) karena fluktuasi produksi migas/batu bara tua yang membuat laju pertumbuhannya sering kali melambat di bawah rata-rata provinsi.

b. Kota Bontang (Kuadran II): Memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi karena industri gas (LNG) dan pupuk, namun laju pertumbuhannya cenderung stagnan/jenuh karena keterbatasan perluasan wilayah geografis ekonomi kota.

c. Kab. Paser & Kab. Berau (Kuadran III): Menunjukkan performa yang baik di sektor perkebunan kelapa sawit dan pariwisata/tambang skala menengah yang tumbuh stabil di

JURNAL EKONOMIKA MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARI'AH eISSN : 2580-8117

atas rata-rata, meski pendapatan per kapitanya belum mampu menyamai raksasa tambang.

d. Kab. Kutai Barat & Kab. Mahakam Ulu (Kuadran IV): Kedua wilayah pedalaman ini masuk kategori relatif tertinggal karena aksesibilitas geografis yang menantang. Ukuran ekonomi (PDRB) keduanya relatif kecil dengan pertumbuhan yang belum mampu berlari kencang, sehingga menjadi penyumbang utama angka ketimpangan internal pada klaster NonMitra Inti.

SIMPULAN

1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terbukti menjadi katalisator kuat dalam menurunkan ketimpangan ekonomi internal di wilayah penyangga terdekat. Indeks Williamson Klaster Mitra Inti (Balikpapan, Samarinda, PPU) menurun tajam dari 0,145 (2020) menjadi 0,098 (2025), menandakan terciptanya pemerataan ekonomi yang hampir sempurna akibat lompatan pertumbuhan sektor konstruksi dan jasa di Kabupaten PPU.
2) Ketimpangan di Klaster NonMitra Inti masih berada pada kategori sedang-tinggi (berkisar 0,421–0,515). Penurunan indeks di klaster ini tidak didorong oleh efek tumpahan (*spillover*) IKN, melainkan akibat normalisasi alami harga komoditas global yang menurunkan dominasi PDRB kabupaten kaya batu bara (Kutim dan Kukar).
3) Analisis Tipologi Klassen menunjukkan pembagian wilayah yang kontras:
   a. Klaster Mitra Inti didominasi oleh daerah *High Growth* (Kuadran I dan III) yang bergerak dinamis menangkap peluang infrastruktur IKN.
   b. Klaster NonMitra Inti terjebak dalam fluktuasi sektor ekstraktif (Kuadran II) dan keterbatasan aksesibilitas pedalaman di Mahakam Ulu serta Kutai Barat yang tetap berada di Kuadran IV (Relatif Tertinggal).

Kutipan dan Referensi

Akita, T., & Alisjahbana, A. (2002). Regional Income Inequality in Indonesia and The Initial Impact of The Economic Crisis. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 38(2). 201–222. [https://doi.org/10.1080/00074910210001683933] (https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1080/00074910210001683933)

Arsyad, L. (2016). Ekonomi Pembangunan (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.

Azhar, H., Ruhama, F. N. A., & Choiron, M. I. (2020). Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur: Kajian Literatur Perspektif Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 22(2), 183–195.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur 2018-2022. BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Hill, H., Resosudarmo, B., & Vidyattama, Y. (2008). Indonesia's Changing Economic Geography. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 44(3), 407–435. [https://doi.org/10.1080/00074910802395344] (https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1080/00074910802395344)

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022: Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Kementerian PPN/Bappenas.

Krugman, P. (2000). The 'New' Economic Geography: Where are We? dalam G. L. Clark, M. P. Feldman, & M. S. Gertler (Ed.). The Oxford Handbook of Economic Geography (hlm. 49–60). Oxford University Press.

Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga.

Kuncoro, M. (2018). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. (Edisi ke-1). UPP STIM YKPN.

Nusantara, A. G. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(2), 1–15.

Prasetyo, D. S., & Firdaus, M. (2016). The Analysis of Regional Economic Disparity in East Kalimantan. Journal of Indonesian Applied Economics, 6(2), 182–195.

Rahayu, A. H., & Widodo, S. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 45–60.

Rangkuti, S. J. K., & Harahap, M. A. (2019). Analisis Tipologi Klassen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 27(1), 45–56.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sekretariat Negara.

Resosudarmo, B. P., Alisjahbana, A., & Nurdianto, D. A. (2012). Energy Security in Indonesia. dalam L. Anceschi & J. Symons (Ed.) Energy Security in the Era of Climate Change. (hlm. 161–179). Palgrave Macmillan.

Sjafrizal. (2008). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. PT RajaGrafindo Persada.

Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suroso, D. S. A., Simanjuntak, H. A., & Zagloel, B. S. (2022). Implications of Relocating Indonesia's Capital City on Regional Development and Economic Disparity. International Journal of Urban Sciences. 26(3). 456–478. [https://doi.org/10.1080/12265934.2022.2045612] (https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1080/12265934.2022.2045612)

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. (Edisi ke-12). Pearson.

JURNAL EKONOMIKA
MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARI'AH
eISSN : 2580-8117